



home ■ pencarian ■ saran anda ■ subscribe ■ links ■ kontak kami ■ English

rentang konflik, masyarakat, ekonomi dan politik

Senin, 25 Juni, 2007

BERITA

BERITA UTAMA

■ **Korupsi: Menggantung Asing dalam Bantuan**

GATRA Online
Senin, 5 Juni, 2006

Index

- ▶ RESPON INTERNASIONAL
- ▶ PEMERINTAH INDONESIA
- ▶ A S N L F
- ▶ PROSES PERDAMAIAN
- ▶ L S M
- ▶ ISU-ISU
- ▶ ANALISA
- ▶ INFO UMUM

HARI-hari sibuk bagi Gregory Hofknecht usai sudah. Pimpinan Save The Children --sebuah non-government organization (NGO) internasional-- di Aceh itu harus kembali ke negara asal, Amerika Serikat, pertengahan Mei lalu. "Mr. Gregory ditempatkan di negara lain," ujar seorang staf Save The Children (SC) yang tak ingin disebutkan namanya kepada Gatra.

Kepergian Gregory tak urung jadi bahan gunjingan. Maklum, warga negara Amerika ini henggang persis sebulan setelah terungkapnya berbagai kasus manipulasi dan mark up di SC. Padahal, laki-laki kelahiran Santa Monica, California, 4 Maret 1955, inilah yang paling getol mengurus kasus haram itu. Dia juga sudah bertindak tegas, tanpa ampun telah memecat sejumlah staf yang dianggap terlibat.

Gregory pun sempat menghentikan aktivitas sejumlah kantor SC di Aceh sejak 3 Maret lalu. "Gregory dipindahkan ke negara lain tempat SC juga beroperasi," kata Jon Bugge. Menurut juru bicara SC ini, kepindahan Gregory tidak terkait kasus penyelewengan dana yang terjadi di SC Aceh. Kepindahannya telah lama dipersiapkan. Benarkah?

Akhiruddin Mahjudin, Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti-Korupsi (Gerak) Aceh, meragukan penjelasan Bugge. Menurutnya, kecil kemungkinan kepindahan Gregory yang akrab disapa Greg itu tidak terkait kasus penyelewengan dana di lembaga yang dia pimpin. "Kemungkinan justru karena Gregory dianggap gagal mencegah terjadinya kasus tersebut," kata Akhiruddin, yang aktif menelisik kasus korupsi di Aceh itu.

Penyelewengan dana di SC Aceh memang mendapat perhatian serius SC pusat di Inggris. Sejumlah investigator SC, termasuk seorang mantan polisi Inggris, bahkan langsung dikirim dari Inggris untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, hampir seluruh personel ICE --salah satu bagian operasional SC-- dirumahkan. Begitu pula tiga konsultan perumahan terpaksa diputus kontraknya dengan SC.

Selain itu, sebanyak 612 rumah atau lebih dari 75% dari jumlah 798 rumah yang telah dibangun SC harus dibongkar. Rumah-rumah yang dibangun dengan dana US\$ 1 juta itu dianggap tidak layak dan tak sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Terutama yang terkait dengan keamanan rumah. SC memang menerapkan standar keamanan cukup ketat bagi anak.

Menurut Akhiruddin, simpul korupsi di SC terjadi di bagian ICE. Hampir seluruh staf ICE diduga melakukan kolusi dengan konsultan dan kontraktor yang membangun rumah di Kabupaten Bireun, Lhouksemawe, Aceh Utara, dan Pidie. Kongkalikong bisa berjalan karena tak ada standar prosedur untuk proses tender pembangunan rumah oleh SC. Tak mengherankan jika hal ini dimanfaatkan sejumlah oknum di ICE.

Modusnya, ICE menunjuk langsung konsultan perumahan untuk mendesain, merencanakan, dan mengawasi jalanya pembangunan rumah. Lalu, siapa kontraktor yang dipilih? ICE menyerahkan sepenuhnya kepada sang konsultan. Lagi-lagi, yang terjadi adalah model penunjukan tanpa proses tender.

Hasilnya, rumah kayu seluas 42 meter persegi dengan harga sesuai kontrak Rp 43.297 juta ditolak para pengungsi. Para pengungsi khawatir, rumah yang mereka tempati bakal roboh. Maklum, material yang digunakan seperti kayu tidak memenuhi standar.

Bahkan, di Pante Raja, Pidie, rumah yang dibangun Haji Suwardi yang merupakan subkontraktor CV Citaci menggunakan batang pohon kelapa yang masih muda. Belum lagi genap satu tahun, bangunan sudah digerogoti rayap. "Digoyang gempa kecil saja bisa roboh, apalagi tsunami," ujar Akhiruddin.

Nah, kasus menggantung dalam selimut bantuan asing ini ternyata tak hanya terjadi di SC. Menurut Akhiruddin, kasus penyelewengan dana oleh staf terjadi di hampir semua NGO asing yang beroperasi di Aceh. Saat ini, setidaknya ada 156 NGO asing dan lokal yang masih konsisten beroperasi di Aceh.

Bahkan menurut Arif Faisal, 34 tahun, seorang staf sebuah NGO asal Kanada, praktek "salam tempel" antara kontraktor dan pemberi kerja --dalam hal ini staf-staf NGO-- adalah hal biasa. Meski ada mekanisme tender, mantan anggota GAM di Calang itu mengakui bahwa para pemenang tender biasa memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ucapan terima kasih. "Kalau mau bukan-bukaan, di semua NGO pasti ada (praktek kolusi)," kata Arif Faisal.

Kasus seperti ini pula yang terjadi di NGO asal Inggris, Oxfam. Bahkan kasus penyimpangan dana ini berakibat penutupan operasional kantor Oxfam di Aceh Besar selama hampir satu bulan. Tidak hanya staf lokal, sejumlah staf internasional pun diduga ikut bermain. Beberapa dari mereka yang terlibat langsung dikenai sanksi: diberhentikan.

Dalam kasus Oxfam, selain terjadi penyelewengan dana bantuan, sejumlah rumah yang dibangun Oxfam juga tidak sesuai dengan spesifikasi dan terkesan asal-asalan. Di Peulangahan, Kecamatan Kutaraja, kota Banda Aceh, misalnya, sejumlah rumah yang dibangun Oxfam terlihat tak terurus. Menurut pantauan Gatra, sejumlah kayu yang digunakan untuk mendirikan rumah terlihat kasar dan bukan kayu kualitas bagus. Bahkan ada yang terlihat seperti kayu bekas.

Pihak Oxfam tidak mengelak soal penyelewengan dana itu. Juru bicara Oxfam Aceh, Yon Thayrun,

menegaskan bahwa pihak Oxfam sudah melakukan penyelidikan internal atas kasus yang merusak citra itu. Penyelidikan yang dilakukan staf internasional dan nasional Oxfam dengan pengawasan langsung dari auditor internasional, PriceWaterhouse Copper, ini dilakukan selama tujuh minggu.

Hasilnya, sejumlah pengadaan barang fiktif dilakukan oleh sejumlah staf lokal dan asing. Selain itu, 20 staf lokal dan internasional dikenai tindakan tegas. Bahkan di antara mereka ada yang langsung diberhentikan dengan tidak hormat. "Mereka berkolusi dengan supplier," ujar mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta itu.

Jumlah kerugian, menurut Yon, ditaksir mencapai US\$ 22.000 atau sekitar Rp 191,4 juta. Sedangkan sejumlah barang yang sempat dibayar tapi tidak pernah dikirim pemasok, senilai Rp 174 juta, dapat diselamatkan.

Pihak Oxfam, kata Yon, belum merasa perlu melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. "Kami masih melakukan penyelidikan di kantor Oxfam lain. Jika sudah lengkap, mungkin baru kami laporkan," kata mantan wartawan Internews itu.

Menurut Yon, kasus penyelewengan dana itu tak mengganggu proyek-proyek yang sedang dijalankan Oxfam. Dari 1.693 rumah yang menjadi target Oxfam hingga tahun 2007, sampai saat ini telah dibangun 665 rumah di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Besar. Karena itu, Yon membantah tuduhan bahwa sejumlah proyek rumah yang dibangun Oxfam bermasalah.

Dari ratusan rumah yang dibangun Oxfam, sebagian besar telah dihuni korban tsunami. Apalagi, rumah yang dibangun adalah hasil kompromi dengan masyarakat penerima bantuan. Namun diakui Yon, pengawasan terhadap pembangunan rumah itu agak lemah.

Untuk mencegah terulangnya penyelewengan, pihak Oxfam membangun sistem pengawasan internal yang ketat. Oxfam menunjuk seorang petugas pencegah kerugian untuk mengawasi semua proyek yang dilakukan. "Kami berharap, ini akan menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan lagi," ujar Yon.

Pengawasan terhadap operasional NGO-NGO asing di Aceh memang sangat kurang. Pada kasus Forder-und Interessengemeinschaft (FIG) Indonesia, misalnya, penyelewengan dana yang diduga dilakukan Presiden FIG Indonesia, Yves Dantin, tak bisa disentuh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Padahal, dana yang ditilap mencapai Rp 10 milyar.

Dana tersebut, menurut Akhiruddin, ditilap warga negara Jerman itu dengan merekayasa laporan kepada para pendonor di Jerman. "Dana yang digunakan untuk proyek di Indonesia hanya setengah dari yang diterimanya," kata Akhiruddin.

Bagaimana pengawasan BRR? Ketua BRR, Kuntoro Mangkusubroto, kepada Astari Yanuarti dari Gatra mengatakan, pengawasan terhadap NGO asing diserahkan ke para pendonor masing-masing. BRR bertugas mengoordinasi penyaluran bantuan yang ada agar tidak tumpang tindih. "Tugas kami hanya mengoordinasi," kata Kuntoro.

